

ANALISIS PEMANFAATAN X DALAM UPAYA KESADARAN BAHAYA KORUPSI YANG BERDAMPAK KEMISKINAN

**Hans Philemon Limanza¹, Jackson Lawrence², Louis Gabriel Hernandes³,
Rich Marvin Lim⁴, Russel Shivah Budiarto⁵, Ni Wayan Ayu Permata Sari.⁶**

**1, 2, 3, 4, ⁵Informatika, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang,
Indonesia, 15810**

⁶Film, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia, 15810

Histori Artikel

Received (filled by editor)

Revised (filled by editor)

Accepted (filled by editor)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan X dalam upaya kesadaran akan bahaya korupsi yang berdampak pada kemiskinan. Korupsi merupakan tindakan merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dalam era digital saat ini, media sosial, khususnya X, menjadi media ataupun wadah yang efektif dalam menyalurkan pendidikan antikorupsi (Forgie, 2012, hlm. 12). Media ini dapat memengaruhi sikap kritis, memberikan pendidikan dan upaya kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menunjukkan sikap kritis terhadap korupsi setelah menerima informasi melalui X. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kesadaran ini belum mendorong pengguna untuk mengambil tindakan konkret dalam melawan korupsi. Meskipun demikian, sebagian besar responden percaya bahwa X dapat digunakan sebagai sarana

pendidikan antikorupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Kata kunci: X, Korupsi, Kemiskinan

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan berbagai pihak karena melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, korupsi telah menjadi perhatian global karena diakui bahwa korupsi bersifat transnasional. Berdasarkan data dari tahun 2013-2016 milik litbang KPK mengenai kerugian negara akibat korupsi, hanya 35% yang berhasil didapatkan kembali dari total kerugian sebesar Rp4.853.615.205.003. (Mahmud, 2020, hlm. 257). Ketidakmampuan untuk mengembalikan dana tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjaga tingkat kemiskinan yang selalu tinggi. Selain itu, ketergangguan perekonomian akibat tindakan korupsi secara logika membuat korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja dan terus membahayakan masyarakat, baik masyarakat miskin, menengah, maupun kaya pada umumnya. Oleh sebab itu, kondisi tersebut memerlukan upaya penanggulangan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada oleh masyarakat sekitar sebagai awal dari pengenalan bahaya korupsi.

Korupsi atau rasuah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti politis, pegawai negeri, atau pihak lain yang terlibat secara ilegal dan tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dengan kata lain, korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat disebabkan oleh kemiskinan melalui ketimpangan perekonomian yang didapati dengan kondisi jika kemiskinan meningkat menyebabkan ketimpangan perekonomian juga makin tinggi beserta dengan korupsinya juga meningkat (Putri & Aimon, 2022, hlm. 16). Pernyataan ini juga didukung oleh Aifa & Siregar (2019, hlm. 468) yang menyatakan bahwa korupsi adalah suatu kondisi yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan menimbulkan jebakan kemiskinan akibat fasilitas publik memiliki kekurangan ataupun partisipasi masyarakat yang kurang cukup dalam pengambilan keputusan

politik, sosial, serta ekonomi yang menghambat pendistribusian sumber daya secara efisien.

Pada kenyataannya, korupsi telah menyusup ke lembaga-lembaga atau pihak-pihak sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa pihak juga berargumentasi bahwa faktor-faktor individual seperti kemiskinan atau penghasilan rendah dapat mendorong perilaku korupsi. Baktiar, dkk. (2020, hlm. 312) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dengan kemiskinan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi faktor perekonomian suatu tempat yang kemudian berdampak kepada tingkat kemiskinan. Ichvani & Sasana (2019, hlm. 70) juga mengatakan bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan, makin bersih suatu negara dari korupsi, maka pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat. Oleh karena itu, praktik korupsi menyebabkan kerugian finansial, menghambat penyediaan layanan publik dan kemajuan bidang sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang terkhususnya Indonesia.

Secara umum, berbagai bentuk korupsi bertujuan untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri atau instansi pribadi dan secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, menghambat kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya berdasarkan lansiran dari aclc.kpk.go.id. Bentuk korupsi yang dimaksud terbagi atas beberapa macam, yaitu suap menyuap, kerugian keuangan negara, meraih posisi tertinggi dengan cara penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan dalam segala hal demi mencapai tujuan yang diinginkan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Harahap, dkk., 2023, hlm. 57). Selain itu, berdasarkan skala dan paparannya, KPK membagi korupsi menjadi tiga jenis, yaitu *petty corruption* (Korupsi berskala kecil oleh pejabat yang berinteraksi dengan masyarakat), *grand corruption* (Korupsi berskala kelas kakap dengan nilai kerugian negara miliaran hingga triliunan rupiah), dan *political corruption* (Korupsi ketika keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memanipulasi). Ketiga jenis korupsi tersebut, baik berskala kecil maupun sedang hingga besar, yang dilakukan melalui suap, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain untuk memanfaatkan dana negara

menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat terutama negara seperti negara Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi.

Di Indonesia, korupsi sudah merajalela, bahkan dianggap sebagai “Budaya” meskipun pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tujuan memberantas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Alasan mengapa seseorang berani melakukan tindakan korupsi adalah karena kerakusan yang dimiliki, gaya hidup konsumtif, moralitas yang tidak kuat menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat (Syarief & Prastiyo, 2018, hlm. 8-9). Selain itu, kekurangan edukasi atau pemahaman terhadap bahaya korupsi membuat sumber daya manusia di Indonesia makin menurun. Oleh karena itu, salah satu cara atau upaya yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah dengan menyebarkan informasi berupa edukasi mengenai nilai antikorupsi melalui jalur pendidikan dan teknologi yang perlu ditanamkan sejak kecil kepada anak didik agar generasi penerus bangsa berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Setyawan, Arief, Alex, Maitri, Chou, Hartono, Jennifer, & Surya, 2022, hlm. 146). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa program antikorupsi yang diimplementasikan bagi penerus bangsa juga diterapkan terhadap masyarakat-masyarakat yang belum pernah menerima pendidikan tersebut, seperti masyarakat miskin yang susah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Jika program antikorupsi tidak dikaitkan dengan intervensi kebutuhan dasar alternatif, hal ini akan berdampak negatif pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam strategi ini, penyertaan modal sosial, politik dan budaya ke dalam analisis kemiskinan sangatlah penting. Strategi-strategi ini harus melihat lebih dekat faktor-faktor yang membatasi peluang akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Negin, dkk. (2010, hlm. 8) mengemukakan bahwa ada tiga jenis program antikorupsi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin sebagai strategi penanggulangan kasus korupsi, yakni inklusivitas, legitimasi, dan akuntabilitas. Inklusivitas diarahkan untuk mengatasi eksklusi sosial yang membatasi partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat yang historisnya kurang beruntung, inklusivitas mendorong pemberdayaan dan

desentralisasi. Keabsahan (legitimasi) berfokus pada isu-isu seperti keadilan, penyelesaian perselisihan, hak asasi manusia, dan kekerasan sosial, yang sangat relevan bagi masyarakat miskin. Adanya ancaman pelecehan dan intimidasi dari otoritas publik membuat akuntabilitas menjadi kunci. Dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memberikan sanksi, masyarakat miskin dapat dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar korban. Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka dan kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka. Dengan meningkatkan akuntabilitas politik, masyarakat miskin dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, dan bukan sebagai korban. Penjabaran ketiga program antikorupsi tersebut dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengedukasi sesama dan tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan implementasi teknologi berupa sosial media juga turut berperan krusial dalam meningkatkan perkembangan dunia antikorupsi.

Di dunia digital yang berkembang pesat ini, media sosial banyak digunakan sebagai tempat untuk ikut terlibat dalam politik secara bebas oleh generasi muda (Sloam, 2016, hlm. 3-4). Selain itu, media sosial berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu (Sosiawan, 2011, hlm. 60). Platform media sosial seperti Twitter adalah saluran yang tepat untuk mengatasi masalah korupsi dan kemiskinan. Berdasarkan data dari “We Are Social” dalam laporan “Digital 2023: Indonesia”, 60% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial Twitter sehingga memungkinkan partisipasi dalam percakapan terbuka dan berbagi informasi di seluruh dunia. Penggunaan media sosial tersebut mendatangkan nilai positif dalam pembelajaran seperti mengajukan dan menyampaikan solusi, kritik, dan manfaat lainnya untuk disampaikan sehingga memungkinkan penggunaannya untuk menyalurkan pemikiran kritis kepada pengguna lainnya dalam bentuk diskusi (Pitaloka, 2022, hlm. 104). Akan tetapi, penggunaan platform media sosial tersebut dapat memengaruhi pola pikir, sikap, bahkan perilaku pengguna dalam kehidupan masyarakat, seperti contoh kasus terkait penyebaran virus Corona terbukti berpengaruh terhadap kondisi kognitif dan perilaku generasi milenial sebagai pengguna sosial media tersebut (Ahmad, 2020, hlm. 135-136). Oleh karena itu, Twitter dapat digunakan sebagai sarana untuk

menyampaikan informasi mengenai dampak korupsi terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi serta menginspirasi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan ini, pengimplementasian Twitter diharapkan mampu mengurangi korupsi yang terjadi saat ini.

Pada bulan Juli 2023, Twitter diakuisisi oleh Elon Musk, seorang pengusaha teknologi miliarder (Iradat, 2023). Musk kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengubah nama Twitter menjadi X. Sehingga, penulis akan merujuk pada Twitter sebagai X untuk seterusnya dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghormati keputusan Elon Musk untuk mengubah nama Twitter. Selain itu, penulis juga ingin menghindari kebingungan bagi orang yang tidak mengetahui perubahan nama sosial media tersebut.

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian serupa menunjukkan bahwa penggunaan X dapat secara efektif membantu dalam bidang edukasi dengan tujuan untuk menitik fokuskan pendidikan antikorupsi. Forgie (2012, hlm. 12) membuktikan pernyataan tersebut bahwa semua *Tweets* publik diarsipkan secara digital oleh Perpustakaan Kongres dapat diakses oleh para peneliti yang ingin melakukan analisis data sekunder dari *Tweets* terkait pendidikan medis yang ada sehingga pendidik kedokteran dapat mulai mengeksplorasi penggunaannya dalam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, penelitian lebih lanjut dan penerapan cerdas keterampilan media, X dapat menjadi tambahan yang berguna untuk pengajaran dan pembelajaran yang lebih personalisasi dalam pendidikan kedokteran. Hal ini terbukti bahwa penyaluran informasi atas pendidikan apapun dapat tersampaikan dengan lancar melalui platform media sosial Twitter. Selain itu, kampanye ataupun kelompok, khususnya di X, juga memegang peranan penting dalam menggerakkan penggunaannya untuk bertindak secara partisipatif dalam gerakan antikorupsi. Baharuddin (2021, hlm. 71) mengutarakan bahwa kehadiran media sosial dianggap sebagai kesempatan untuk ide-ide baru untuk memaksimalkan setiap gerakan dan kampanye atau komunitas yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Kampanye tersebut dapat diselenggarakan dengan lebih kreatif dan didukung dengan keterampilan dalam menggunakan platform media sosial sehingga mampu menarik perhatian pengguna X. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa kampanye

tersebut dapat dinilai sebagai bagian pertumbuhan dari literasi digital bagi penggunaanya dalam pemahaman wacana politik Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan X dinilai mampu mengutarakan informasi kepada pengguna X dalam isu-isu antikorupsi dengan mampu menggerakkan penggunaanya dalam bentuk kampanye ataupun komunitas secara kolektif yang dicirikan dengan pendekatan yang strategi lebih kreatif di platform media sosial X.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif memberikan penekanan khusus pada penggunaan logika untuk menganalisis dinamika hubungan antara peristiwa yang diamati dan proses inferensi deduktif dan induktif (Abdussamad, 2021, hlm. 29). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada subjek penelitian, yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Pembuatan kuesioner tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan *Google Form* dan dibagikan kepada responden dalam bentuk tautan. Dalam kasus ini, peneliti menargetkan 40 responden sebagai jumlah subjek penelitian yang nantinya akan diolah jawabannya. Alasan penulis memilih mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sebagai subjek penelitian ini adalah untuk mempersempit jangkauan penelitian dan sebagai generasi terpelajar harus menerapkan pendidikan antikorupsi untuk mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari, dengan alasan karena lembaga pendidikan tidak terlalu fokus pada sosialisasi pendidikan tentang bahaya korupsi dan cara penanggulangannya. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan partisipan terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali aspek-aspek yang bersifat kualitatif, menemukan makna, serta mengidentifikasi pola dan temuan yang muncul dari hasil pengisian kuesioner oleh subjek penelitian. Proses analisis data kualitatif akan melibatkan transkripsi hasil kuesioner ke dalam bentuk tabel dengan perhitungan persentase jumlah jawaban responden, pengodean, pengelompokan tema, dan penafsiran makna dari data kuesioner yang dikumpulkan, serta

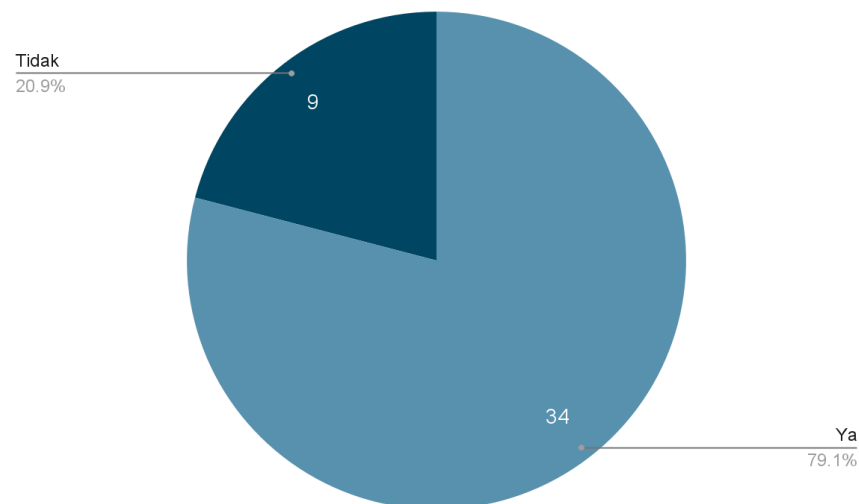
menggabungkan hasil temuan dengan teori terkait yang mendukung hasil tersebut. Pada akhirnya, proses pengumpulan dan proses analisis data yang telah diutarakan sebelumnya pada penelitian ini akan menghasilkan temuan yang mendukung kesimpulan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil & Analisis

1. Hasil

Grafik-grafik yang ditampilkan di bawah adalah jawaban dari 43 responden terkait kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sebagai subjek penelitian ini.

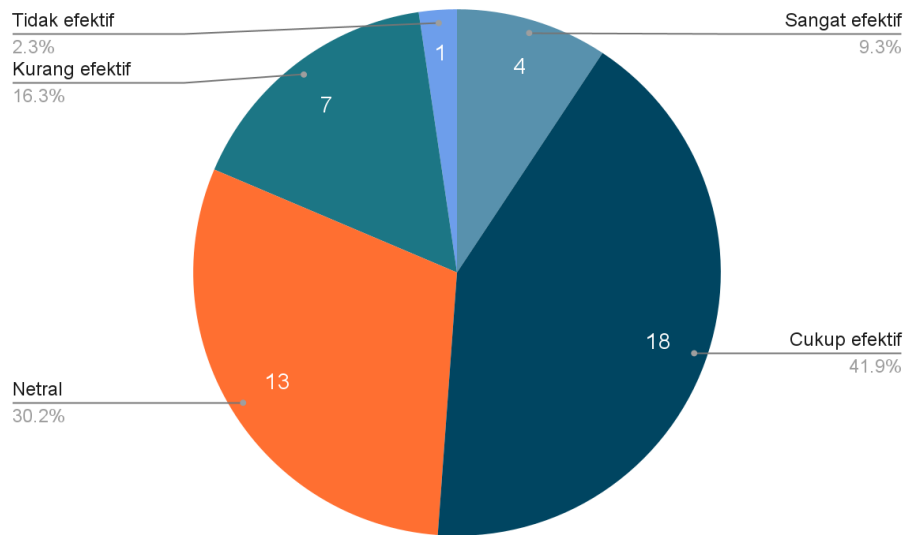
Grafik 1. Pengaruh informasi tentang korupsi dan kemiskinan di X terhadap sikap kritis terhadap tindakan korupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 1 menunjukkan mayoritas responden mengalami peningkatan dalam menjadi lebih kritis terhadap tindakan korupsi setelah menerima informasi mengenai korupsi dan kemiskinan di X, yaitu sebanyak 34 dari 43 responden (79,1%).

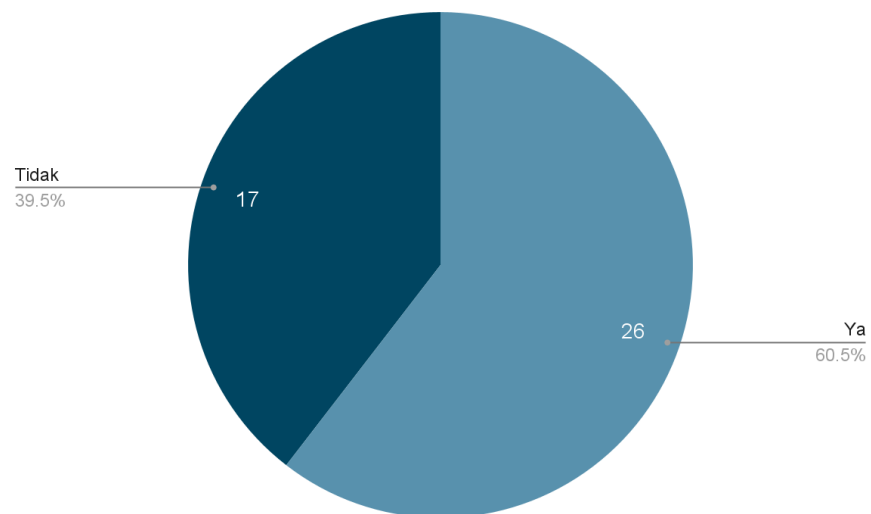
Grafik 2. Tingkat efektivitas kampanye antikorupsi di X dalam menyebarkan informasi mengenai antikorupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 2 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan tingkat efektivitas kampanye antikorupsi di X cukup tinggi dalam menyebarkan informasi mengenai antikorupsi, yaitu sebanyak 18 dari 43 responden (41,9%).

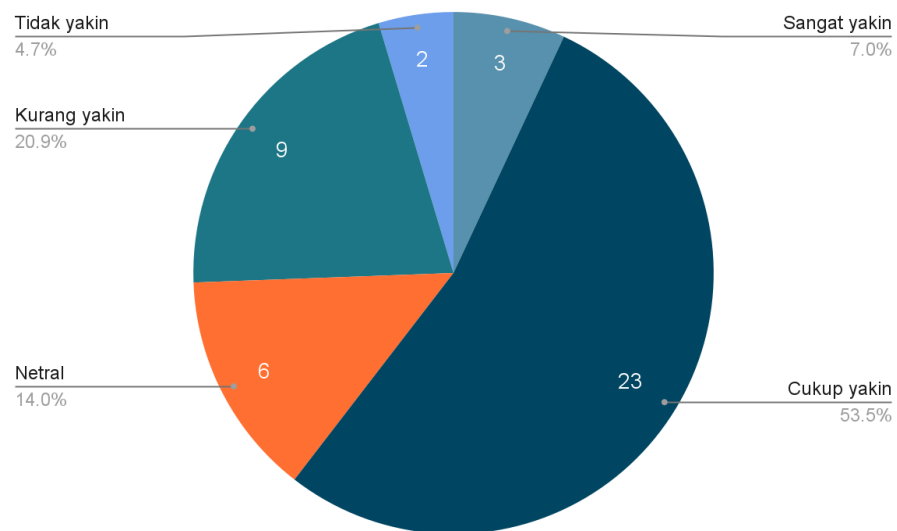
Grafik 3. Pengaruh informasi antikorupsi di X pada sikap atau tindakan terhadap korupsi sehari-hari



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 3 menyatakan sebagian besar responden mengalami perubahan sikap atau tindakan pada kehidupan sehari-hari terhadap tindakan korupsi setelah menerima informasi antikorupsi di X, yaitu sebanyak 26 dari 43 responden (60,5%).

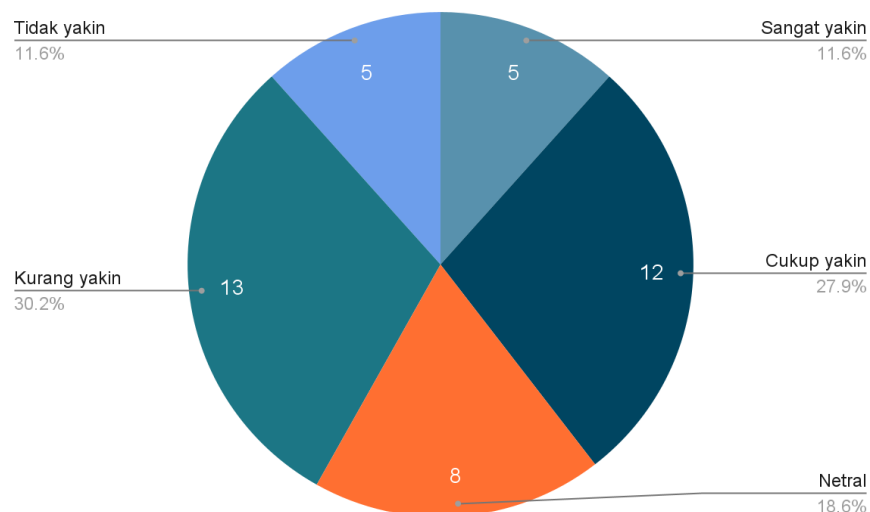
Grafik 4. Tingkat keyakinan terhadap pentingnya peran media sosial khususnya X dalam edukasi memberantas korupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden cukup yakin bahwa edukasi melalui media sosial, khususnya X, dapat berperan penting dalam memberantas korupsi, yaitu sebanyak 23 dari 43 responden (53,5%).

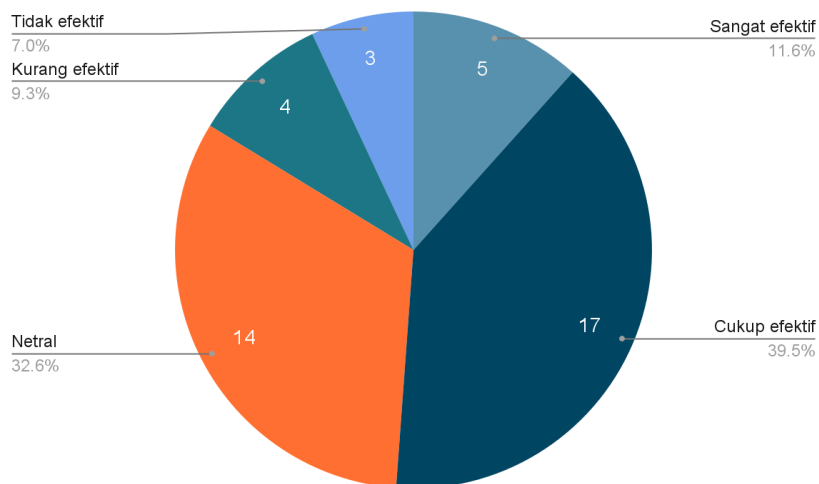
Grafik 5. Tingkat keyakinan terhadap peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X dalam mengurangi tingkat kemiskinan



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 5 membuktikan bahwa sebagian besar responden menilai kurang yakin bahwa peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat, yaitu sebanyak 13 dari 43 responden (30,2%).

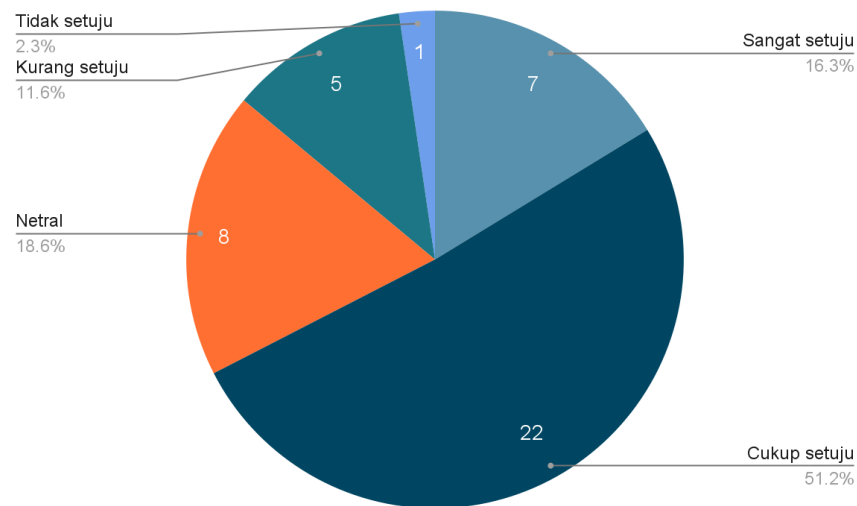
Grafik 6. Tingkat efektivitas penggunaan X sebagai sarana edukasi antikorupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 6 membuktikan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat efektivitas implementasi penggunaan X sebagai sarana edukasi antikorupsi cukup tinggi, yaitu sebanyak 17 dari 43 responden (39,5%).

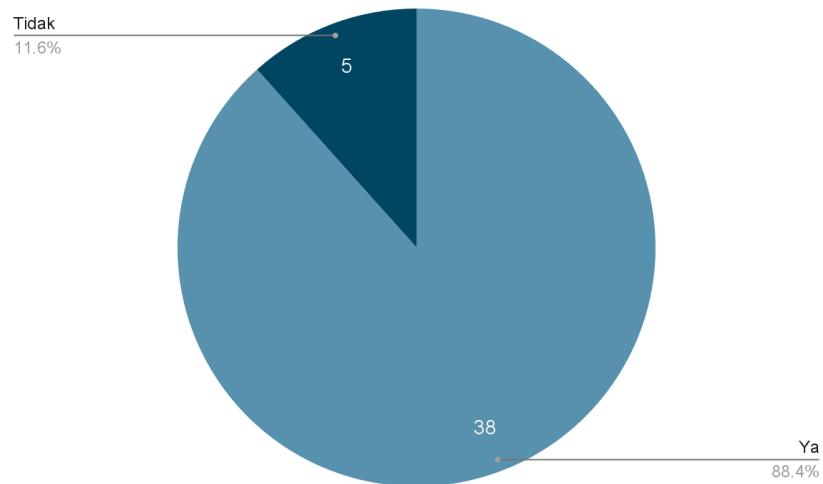
Grafik 7. Tingkat persetujuan platform media sosial X sebagai metode untuk meningkatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan di masa depan



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 7 menunjukkan lebih dari setengah responden cukup setuju bahwa platform media sosial seperti X dapat menjadi metode untuk meningkatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan di masa depan sebanyak 22 dari 43 responden (51,2%).

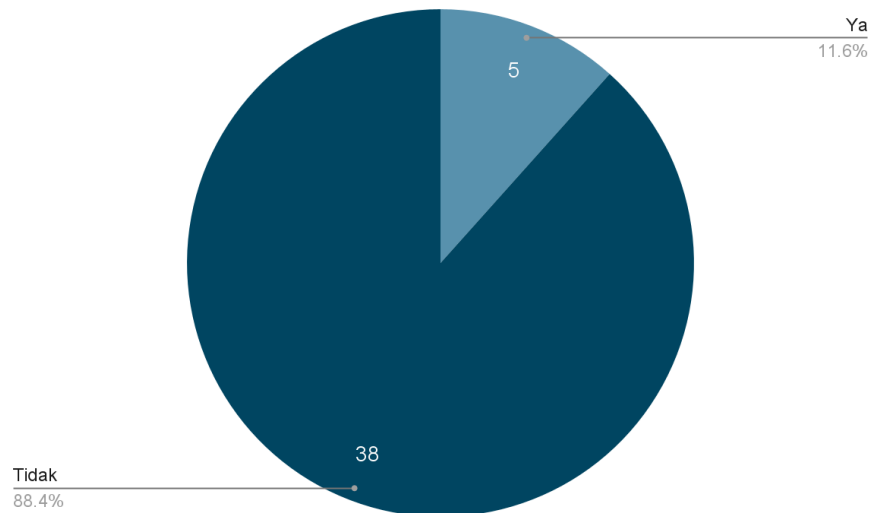
Grafik 8. Pengaruh penyebaran informasi pada X dari hubungan antarmasyarakat dalam interaksi sosial



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 8 menunjukkan mayoritas responden menyatakan bahwa penggunaan X dalam penyebaran informasi dapat memengaruhi hubungan antarmasyarakat dalam interaksi sosial, yaitu sebanyak 38 dari 43 responden (88,4%).

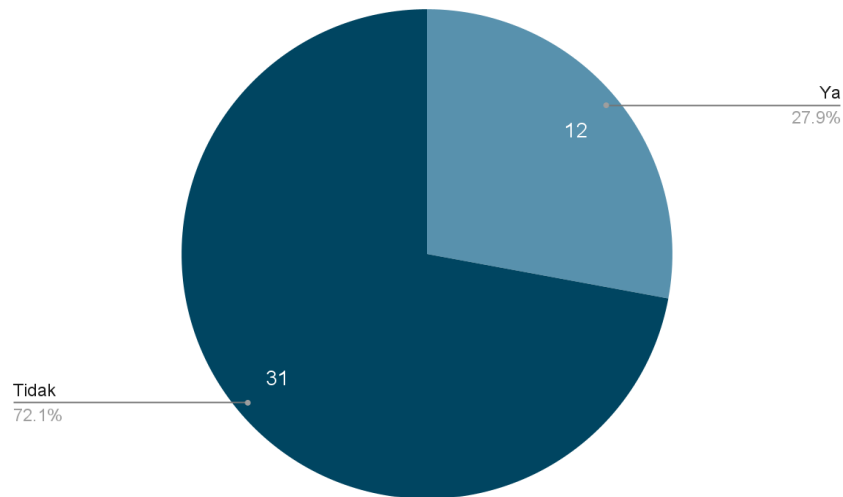
Grafik 9. Keterlibatan dalam kegiatan luring yang dipengaruhi oleh informasi atau kampanye antikorupsi di X



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 9 menunjukkan sebagian besar responden tidak pernah mengikuti atau terlibat dalam kegiatan antikorupsi yang diselenggarakan secara luring dari informasi yang didapatkan melalui X, yaitu sebanyak 38 dari 43 responden (88,4%).

Grafik 10. Keaktifan dalam menyebarkan informasi antikorupsi di X



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 10 menunjukkan mayoritas responden tidak aktif dalam menyebarkan informasi antikorupsi di media sosial, terutama X, yaitu sebanyak 31 dari 43 responden (72,1%).

2. Analisis

Penjabaran hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan cara pembagian kuesioner membuahkan analisis dengan tujuan untuk membandingkan dan membuktikan hasil yang penulis dapatkan dengan teori-teori pendukung yang tertera pada bagian Pendahuluan. Analisis hasil penelitian beserta dengan penjabaran penjelasannya dengan pengelompokannya adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Informasi Korupsi dan Kemiskinan di X

Informasi korupsi dan kemiskinan di X dapat memiliki pengaruh terhadap pengguna aplikasi tersebut. Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan mayoritas responden sebanyak 34 dari 43 responden (79,1%) mendapatkan pengaruh berupa adanya penunjukan sikap kritis terhadap tindakan korupsi setelah mendapatkan informasi di X. Selain itu, sebanyak 26 dari 43 responden (60,5%) mendapatkan pengaruh berupa perubahan pada sikap terhadap tindakan korupsi di X. Adapun teori yang dikemukakan oleh Ahmad mendukung kedua hasil penelitian tersebut yang menyatakan tentang pola pikir, sikap, dan perilaku dapat dipengaruhi oleh penggunaan platform sosial media (Ahmad, 2020, hlm. 135-136). Meskipun informasi korupsi dan kemiskinan di X terbukti berpengaruh dalam perubahan pada sikap terhadap korupsi di X, hal ini cenderung tidak dapat mengajak pengguna X untuk melakukan tindakan antikorupsi. Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden sebanyak 31 dari 43 responden (72,1%) yang menyatakan responden tidak aktif dalam menyebarkan atau menerima informasi antikorupsi di X. Hasil penelitian ini membuahkan penemuan baru terhadap teori yang dikemukakan sebelumnya oleh Forgie bahwa sebenarnya pengaruh X dapat membuat penggunanya meningkatkan sikap partisipatif, bukan apatis terhadap bahaya korupsi (Forgie, 2012, hlm. 12).

2. Tingkat Efektivitas Kampanye Antikorupsi di X

Kampanye-kampanye di X dinilai berguna sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide baru yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Sebanyak 41,9% responden menyatakan bahwa kampanye antikorupsi di X cukup efektif, 9,3% responden menyatakan sangat efektif, dan hanya 2,3% responden menyatakan tidak efektif. Hasil penelitian tersebut didukung dengan pernyataan dalam teori Baharuddin yang mengungkapkan bahwa media sosial

berpotensi untuk ide-ide baru dalam memaksimalkan setiap gerakan dan kampanye yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia (Baharuddin, 2021, hlm. 71).

3. Keyakinan terhadap Peran X dalam Edukasi

X dapat digunakan sebagai edukasi atau pembelajaran yang lebih terpersonalisasi dalam suatu bidang pendidikan. Sebagian besar responden (53,5%) menyatakan bahwa mereka cukup yakin akan peran X dalam edukasi antikorupsi. 17 responden (39,5%) juga menyatakan bahwa X cukup efektif sebagai sarana edukasi antikorupsi. Selain itu, sebanyak 22 responden (51,2%) cukup setuju bahwa X dapat meningkatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut didukung oleh suatu teori yang telah dikemukakan oleh Forgie yang mengutarakan tentang X dapat dijadikan wadah edukasi dalam bidang pendidikan (Forgie, 2012, hlm. 12).

4. Kesadaran akan Bahaya Korupsi melalui X

X dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi. Jumlah responden yang sangat yakin bahwa X dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi sama dengan jumlah responden yang tidak yakin, yaitu 5 dari 43 responden (11,6%). Selain itu, sebanyak 13 dari 43 responden (30,2%) menyatakan responden kurang yakin bahwa X dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Jumlah ini tidak beda jauh dari jumlah responden yang cukup yakin akan hal tersebut, yaitu sebesar 27,9% atau sebanyak 12 dari 43 responden. Oleh karena itu, hasil penelitian bagian ini mengambil kesimpulan dengan mengutamakan persentase responden yang lebih tinggi, yaitu 30,2% atau sebanyak 13 dari 43 responden yang menyatakan cukup yakin akan keyakinan terhadap peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X dalam mengurangi tingkat

kemiskinan. Dengan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa akumulasi jawaban responden didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ahmad dengan teorinya yang menyatakan bahwa X dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran bahaya korupsi (Ahmad, 2020, hlm. 135-136).

5. Keterlibatan dalam Kegiatan Luring Melalui Informasi di X

Penyebaran informasi di X tidak dapat mendorong penggunaannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan antikorupsi. Hampir seluruh responden (88,4%) menyatakan bahwa responden tersebut tidak pernah terlibat dalam aktivitas atau kegiatan luring yang dipengaruhi oleh informasi dari X. Fakta ini membuahkan penemuan baru dari teori yang dikemukakan sebelumnya oleh Ahmad bahwa sarana penyaluran informasi di X dapat mendorong keterlibatan masyarakat pada kegiatan antikorupsi (Ahmad, 2020, hlm. 135-136).

Simpulan

Korupsi telah merugikan berbagai pihak karena sifatnya yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Akibatnya, salah satu cara atau upaya penanggulangan yang dapat dilaksanakan adalah dengan memanfaatkan teknologi terutama sosial media, khususnya X, dalam penyaluran informasi berupa pemberian edukasi sebagai kesimpulan singkat pada penelitian ini. Secara lengkap, simpulan pada penelitian ini adalah X memiliki potensi sebagai sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat terhadap tindakan korupsi dan meningkatkan upaya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi meskipun penyaluran pendidikan tersebut dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang dalam penggunaan platform sosial media tersebut. Konteks tersebut dapat berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi yang berdampak kemiskinan. Terlebih lagi, upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dan kampanye yang aktif di X. Meskipun X mampu secara efektif menyampaikan informasi dan menjadi wadah beredukasi dalam bidang pendidikan, masyarakat

masih kurang aktif dan belum meningkatkan sifat partisipatif dalam menyebarkan informasi tersebut sehingga platform ini belum dapat menggerakkan masyarakat secara optimal untuk terlibat dalam kegiatan antikorupsi yang diadakan secara luring. Dengan kata lain, penelitian ini menyimpulkan bahwa X, selain berfungsi sebagai platform media sosial, juga merupakan kanal distribusi informasi yang dapat memberikan dampak positif berupa tempat beredukasi. Penggunaan X tersebut mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara tidak langsung terhadap bahaya korupsi dengan upayanya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi yang berdampak pada masalah kemiskinan meskipun memiliki kesulitan dalam merangsang keterlibatan aktif masyarakat.

Sumber Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html>
- Ahmad, A., & Nurhidaya, N. (2020). Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial. *Avant Garde*, 8(2), 135-136.
https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/avantgarde/article/view/1158/pdf_44
- Aifa, R., & Siregar, M. I. (2019). Korupsi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 464-473.
<https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/14963>
- Aisyah. (2018). Pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap sikap tanggungjawab dan kemampuan berpikir kritis di kelas V SD Negeri 02 Pliken. *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
<https://repository.ump.ac.id/8025/>
- Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye antikorupsi kaum muda melalui media sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 71.
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3827/3401>
- Baktiar, A. F., Fadhillah, H., Simatupang, M. D., Warman, M., Vira, S., & Nooraeni, R. (2020). Pengaruh tindak korupsi terhadap kemiskinan di negara-negara

- Asia Tenggara dengan model panel data. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(2), 311–320. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v4i2.634>
- Forgie, S. E., Duff, J. P., & Ross, S. (2012). Twelve tips for using Twitter as a learning tool in medical education. *Medical Teacher*, 35(1), 12. <https://doi.org/10.3109/0142159x.2012.746448>
- Harahap, N. D., Sitompul, S., Firmansyah, E., Siregar, A., & Wulandari, A. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 57. <https://www.marsipature.makarioz.org/index.php/marsipature/article/view/38>
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1342>
- Iradat, D. (2023, October 3). Ganti nama Twitter jadi X, perusahaan Elon Musk digugat. *Teknologi*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231003201203-206-1006741/ganti-nama-twitter-jadi-x-perusahaan-elon-musk-digugat>
- Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 257. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi media sosial dalam pembelajaran generasi Z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>
- Negin, V., Abd Rashid, Z., Nikopour, H., B, Z., & Rashid, A. (2010). The causal relationship between corruption and poverty: A panel data analysis. Munich Personal RePEc Archive. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/24871>
- Pitaloka, E. D., Aprilizdihar, M., & Dewi, S. (2022). Pemanfaatan sosial media sebagai sarana pembelajaran di era digital. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 4(02), 104. <https://doi.org/10.30871/deca.v5i01.3717>

- Putri, R., D., & Aimon, H. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi pengguna internet, kemiskinan dan korupsi di negara ASEAN: Lower middle income. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 16. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/13317/5143>
- Setyawan, A., Arief, R. F., Alex, A., Maitri, B., Chou, C., Hartono, C., Jennifer, F., & Surya, P. (2022). Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya integritas dan sikap anti korupsi di SMA Mondial Batam untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 146. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6934>
- Sloam, J. (2016). Diversity and voice: The political participation of young people in the European Union. *The British Journal of Politics and International Relations*, 18(3), 3-4. <https://doi.org/10.1177/1369148116647176>
- Sosiawan, E. A. (2011). Penggunaan situs jejaring sosial sebagai media interaksi dan komunikasi di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 60. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3416/2586>
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: Antara faktor penyebab dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 8–9. <https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3947>
- We Are Social (2023). Digital 2023: Indonesia. DataReportal – Global Digital Insights. <https://indd.adobe.com/embed/3f33174b-35c2-465a-94da-07e39f5687a0?startpage=1>

Kelompok1_UM142O_HANS PHILEMON LIMANZ

by MKDU UMN

Submission date: 20-Dec-2023 05:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2263067686

File name: Kelompok1_UM142O_HANS_PHILEMON_LIMANZ.pdf (429.7K)

Word count: 3337

Character count: 22552

ANALISIS PEMANFAATAN X DALAM UPAYA KESADARAN BAHAYA KORUPSI YANG BERDAMPAK KEMISKINAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan X dalam upaya kesadaran akan bahaya korupsi yang berdampak pada kemiskinan. Korupsi merupakan tindakan merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dalam era digital saat ini, media sosial, khususnya X, menjadi media ataupun wadah yang efektif dalam menyalurkan pendidikan antikorupsi (Forgie, 2012, hlm. 12). Media ini dapat mempengaruhi sikap kritis, memberikan pendidikan dan upaya kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menunjukkan sikap kritis terhadap korupsi setelah menerima informasi melalui X. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kesadaran ini belum mendorong pengguna untuk mengambil tindakan konkret dalam melawan korupsi. Meskipun demikian, sebagian besar responden percaya bahwa X dapat digunakan sebagai sarana pendidikan antikorupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Kata kunci: X, Korupsi, Kemiskinan

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan berbagai pihak karena melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, korupsi telah menjadi perhatian global karena diakui bahwa korupsi bersifat transnasional. Berdasarkan data dari tahun 2013-2016 milik litbang KPK mengenai kerugian negara akibat korupsi, hanya 35% yang berhasil didapatkan kembali dari total kerugian sebesar Rp4.853.615.205.003. (Mahmud, 2020, hlm. 257). Ketidakmampuan untuk mengembalikan dana tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjaga tingkat kemiskinan yang selalu tinggi. Selain itu, ketergangguan perekonomian akibat tindakan korupsi secara logika membuat korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja dan terus membahayakan masyarakat, baik masyarakat miskin, menengah, maupun kaya pada umumnya. Oleh sebab itu, kondisi tersebut memerlukan upaya penanggulangan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada oleh masyarakat sekitar sebagai awal dari pengenalan bahaya korupsi.

Korupsi atau rasuah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti politis, pegawai negeri, atau pihak lain yang terlibat secara ilegal dan tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan yang signifikan besar (Aisyah, 2018, hlm. 9). Dengan kata lain, korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat disebabkan oleh kemiskinan melalui ketimpangan perekonomian yang didapati dengan kondisi jika kemiskinan meningkat menyebabkan ketimpangan perekonomian juga makin tinggi beserta dengan korupsinya juga meningkat (Putri & Aimon, 2022, hlm. 16). Pernyataan ini juga didukung oleh Aifa & Siregar (2019, hlm. 468) yang menyatakan bahwa korupsi adalah suatu kondisi yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan menimbulkan jebakan kemiskinan akibat fasilitas publik memiliki kekurangan ataupun partisipasi masyarakat yang kurang cukup dalam pengambilan keputusan politik, sosial, serta ekonomi yang menghambat pendistribusian sumber daya secara efisien.

Pada kenyataannya, korupsi telah menyusup ke lembaga-lembaga atau pihak-pihak sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa pihak juga berargumentasi bahwa faktor-faktor individual seperti kemiskinan atau penghasilan rendah dapat mendorong perilaku korupsi. Baktiar, dkk. (2020, hlm. 312) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dengan kemiskinan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi faktor perekonomian suatu tempat yang kemudian berdampak kepada tingkat kemiskinan. Ichvani & Sasana (2019, hlm. 70) juga mengatakan bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan, makin bersih suatu negara dari korupsi, maka pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat. Oleh karena itu, praktik korupsi menyebabkan kerugian finansial, menghambat penyediaan layanan publik dan kemajuan bidang sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang terkhususnya Indonesia.

Secara umum, berbagai bentuk korupsi bertujuan untuk mengambil keuntungan demi diri sendiri atau instansi pribadi dan secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, menghambat kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya berdasarkan lansiran dari aclc.kpk.go.id. Bentuk korupsi yang dimaksud terbagi atas beberapa macam, yaitu suap menyuap, kerugian keuangan negara, meraih posisi tertinggi dengan cara penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan dalam segala hal demi mencapai tujuan yang diinginkan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Harahap, dkk., 2023, hlm. 57). Selain itu, berdasarkan skala dan paparannya, KPK membagi korupsi menjadi tiga jenis, yaitu *petty corruption* (Korupsi berskala kecil oleh pejabat yang berinteraksi dengan masyarakat), *grand corruption* (Korupsi berskala kelas kakap dengan nilai kerugian negara miliaran hingga triliunan rupiah), dan *political corruption* (Korupsi ketika keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memanipulasi). Ketiga jenis korupsi tersebut, baik berskala kecil maupun sedang hingga besar, yang dilakukan melalui suap, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain untuk memanfaatkan dana negara menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat terutama negara seperti negara Indonesia yang tingkat korupsinya tinggi.

Di Indonesia, korupsi sudah merajalela, bahkan dianggap sebagai “Budaya” meskipun pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tujuan memberantas tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Alasan mengapa seseorang berani melakukan tindakan korupsi adalah karena kerakusan yang dimiliki, gaya hidup konsumtif, moralitas yang tidak kuat menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat (Syarif & Pratiyo, 2018, hlm. 8-9). Selain itu, kekurangan edukasi atau pemahaman terhadap bahaya korupsi membuat sumber daya manusia di Indonesia makin menurun. Oleh karena itu, salah satu cara atau upaya yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah dengan menyebarkan informasi berupa edukasi mengenai nilai antikorupsi melalui jalur pendidikan dan teknologi yang perlu ditanamkan sejak kecil kepada anak didik agar generasi penerus bangsa berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Setyawan, Arief, Alex, Maitri, Chou, Hartono, Jennifer, & Surya, 2022, hlm. 146). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa program antikorupsi yang diimplementasikan bagi penerus bangsa juga diterapkan terhadap masyarakat-masyarakat yang belum pernah menerima pendidikan tersebut, seperti masyarakat miskin yang susah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Jika program antikorupsi tidak dikaitkan dengan intervensi kebutuhan dasar alternatif, hal ini akan berdampak negatif pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam strategi ini, penyertaan modal sosial, politik dan budaya ke dalam analisis kemiskinan sangatlah penting. Strategi-strategi ini harus melihat lebih dekat faktor-faktor yang membatasi peluang akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Negin, dkk. (2010, hlm. 8) mengemukakan bahwa ada tiga jenis program antikorupsi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin sebagai strategi

penanggulangan kasus korupsi, yakni inklusivitas, legitimasi, dan akuntabilitas. Inklusivitas diarahkan untuk mengatasi eksklusi sosial yang membatasi partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat yang historisnya kurang beruntung, inklusivitas mendorong pemberdayaan dan desentralisasi. Keabsahan (legitimasi) berfokus pada isu-isu seperti keadilan, penyelesaian perselisihan, hak asasi manusia, dan kekerasan sosial, yang sangat relevan bagi masyarakat miskin. Adanya ancaman pelecehan dan intimidasi dari otoritas publik membuat akuntabilitas menjadi kunci; dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memberikan sanksi, masyarakat miskin dapat dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar korban. Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka dan kemungkinan memberikan sanksi kepada mereka. Dengan meningkatkan akuntabilitas politik, masyarakat miskin dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, dan bukan sebagai korban. Penjabaran ketiga program antikorupsi tersebut dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengedukasi sesama dan tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan implementasi teknologi berupa sosial media juga turut berperan krusial dalam meningkatkan perkembangan dunia antikorupsi.

Di dunia digital yang berkembang pesat ini, media sosial banyak digunakan sebagai tempat untuk ikut terlibat dalam politik secara bebas oleh generasi muda (Sloam, 2016, hlm. 3-4). Selain itu, media sosial berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu (Sosiawan, 2011, hlm. 60). Platform media sosial seperti Twitter adalah saluran yang tepat untuk mengatasi masalah korupsi dan kemiskinan. Berdasarkan data dari We Are Social dalam laporan Digital 2023: Indonesia, 60% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial Twitter sehingga memungkinkan partisipasi dalam percakapan terbuka dan berbagi informasi di seluruh dunia. Penggunaan media sosial tersebut mendatangkan nilai positif dalam pembelajaran seperti mengajukan dan menyampaikan solusi, kritik, dan manfaat lainnya untuk disampaikan sehingga memungkinkan penggunaannya untuk menyalurkan pemikiran kritis kepada pengguna lainnya dalam bentuk diskusi (Pitaloka, 2022, hlm. 104). Akan tetapi, penggunaan platform media sosial tersebut dapat memengaruhi pola pikir, sikap, bahkan perilaku pengguna dalam kehidupan masyarakat, seperti contoh kasus terkait penyebaran virus Corona terbukti berpengaruh terhadap kondisi kognitif dan perilaku generasi milenial sebagai pengguna sosial media tersebut (Ahmad, 2020, hlm. 135-136). Oleh karena itu, Twitter dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai dampak korupsi terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi serta menginspirasi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan ini, pengimplementasian Twitter diharapkan mampu mengurangi korupsi yang terjadi saat ini.

Pada bulan Juli 2023, Twitter diakuisisi oleh Elon Musk, seorang pengusaha teknologi miliarder (Iradat, 2023). Musk kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengubah nama Twitter menjadi X. Sehingga, penulis akan merujuk pada Twitter sebagai X untuk seterusnya dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghormati keputusan Elon Musk untuk mengubah nama Twitter. Selain itu, penulis juga ingin menghindari kebingungan bagi orang yang tidak mengetahui perubahan nama sosial media tersebut.

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian serupa menunjukkan bahwa penggunaan X dapat secara efektif membantu dalam bidang edukasi dengan tujuan untuk menarik fokuskan pendidikan antikorupsi. Forgie (2012, hlm. 12) membuktikan pernyataan tersebut bahwa semua *Tweets* publik diarsipkan secara digital oleh Perpustakaan Kongres dapat diakses oleh para peneliti yang ingin melakukan analisis data sekunder dari *Tweets* terkait pendidikan medis yang ada sehingga pendidik kedokteran dapat mulai mengeksplorasi penggunaannya dalam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, penelitian lebih lanjut dan penerapan cerdas keterampilan media, X dapat menjadi tambahan yang berguna untuk pengajaran dan pembelajaran yang lebih

personalisasi dalam pendidikan kedokteran. Hal ini terbukti bahwa penyaluran informasi atas pendidikan apapun dapat tersampaikan dengan lancar melalui platform media sosial Twitter. Selain itu, kampanye ataupun kelompok, khususnya di X, juga memegang peranan penting dalam menggerakkan penggunanya untuk bertindak secara partisipatif dalam gerakan antikorupsi. Baharuddin (2021, hlm. 71) mengutarakan bahwa kehadiran media sosial dianggap sebagai kesempatan untuk ide-ide baru untuk memaksimalkan setiap gerakan dan kampanye atau komunitas yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Kampanye tersebut dapat diselenggarakan dengan lebih kreatif dan didukung dengan keterampilan dalam menggunakan platform media sosial sehingga mampu menarik perhatian pengguna X. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa kampanye tersebut dapat dinilai sebagai bagian pertumbuhan dari literasi digital bagi penggunanya dalam pemahaman wacana politik Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan X dinilai mampu mengutarakan informasi kepada pengguna X dalam isu-isu antikorupsi dengan mampu menggerakkan penggunanya dalam bentuk kampanye ataupun komunitas secara kolektif yang dicirikan dengan pendekatan yang strategi lebih kreatif di platform media sosial X.



Metode Penelitian

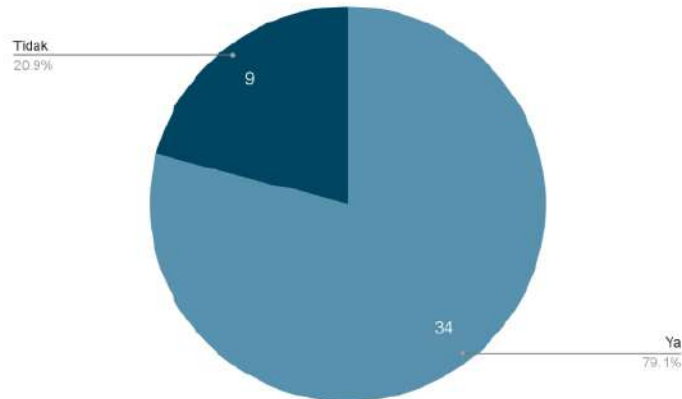
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif memberikan penekanan khusus pada penggunaan logika untuk menganalisis dinamika hubungan antara peristiwa yang diamati dan proses inferensi deduktif dan induktif (Abdussamad, 2021, hlm. 29). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada subjek penelitian, yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Pembuatan kuesioner tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan *Google Form* dan dibagikan kepada responden dalam bentuk tautan. Dalam kasus ini, peneliti menargetkan 40 responden sebagai jumlah subjek penelitian yang nantinya akan diolah jawabannya. Alasan penulis memilih mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sebagai subjek penelitian ini adalah untuk mempersempit jangkauan penelitian dan sebagai generasi terpelajar harus menerapkan pendidikan antikorupsi untuk mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari, dengan alasan karena lembaga pendidikan tidak terlalu fokus pada sosialisasi pendidikan tentang bahaya korupsi dan cara penanggulangannya. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan partisipan terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali aspek-aspek yang bersifat kualitatif, menemukan makna, serta mengidentifikasi pola dan temuan yang muncul dari hasil pengisian kuesioner oleh subjek penelitian. Proses analisis data kualitatif akan melibatkan transkripsi hasil kuesioner ke dalam bentuk tabel dengan perhitungan persentase jumlah jawaban responden, pengkodean, pengelompokan tema, dan penafsiran makna dari data kuesioner yang dikumpulkan, serta menggabungkan hasil temuan dengan teori terkait yang mendukung hasil tersebut. Pada akhirnya, proses pengumpulan dan proses analisis data yang telah diutarakan sebelumnya pada penelitian ini akan menghasilkan temuan yang mendukung kesimpulan dalam bentuk hasil penelitian.

Hasil & Analisis

1. Hasil

Grafik-grafik yang ditampilkan di bawah adalah jawaban dari 43 responden terkait kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sebagai subjek penelitian ini.

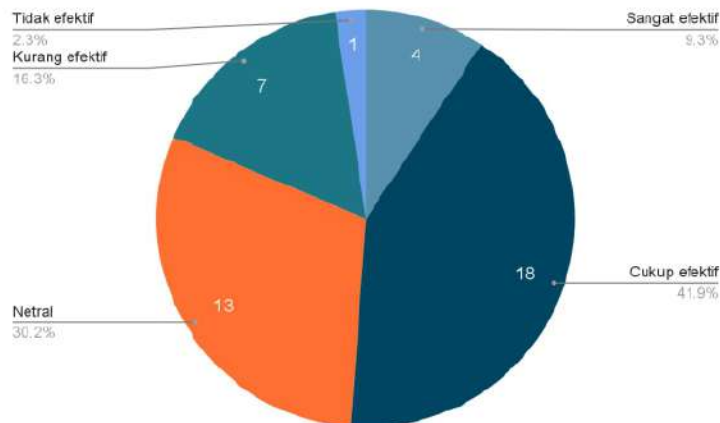
Grafik 1. Pengaruh informasi tentang korupsi dan kemiskinan di X terhadap sikap kritis terhadap tindakan korupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 1 menunjukkan mayoritas responden mengalami peningkatan dalam menjadi lebih kritis terhadap tindakan korupsi setelah menerima informasi mengenai korupsi dan kemiskinan di X yaitu sebanyak 34 dari 43 responden (79,1%).

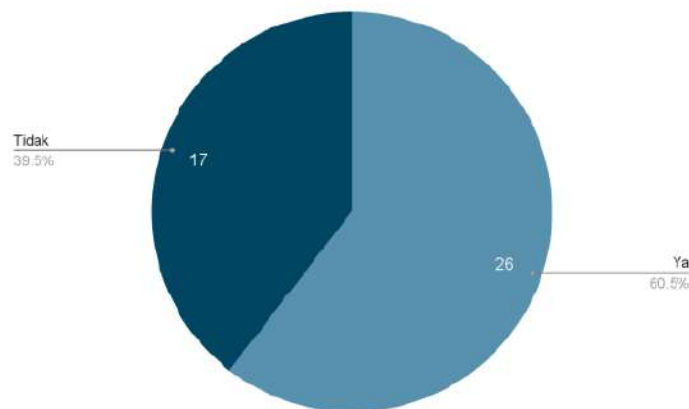
Grafik 2. Tingkat efektivitas kampanye antikorupsi di X dalam menyebarkan informasi mengenai antikorupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 2 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan tingkat efektivitas kampanye antikorupsi di X cukup efektif dalam menyebarkan informasi mengenai antikorupsi, yaitu sebanyak 18 dari 43 responden (41,9%).

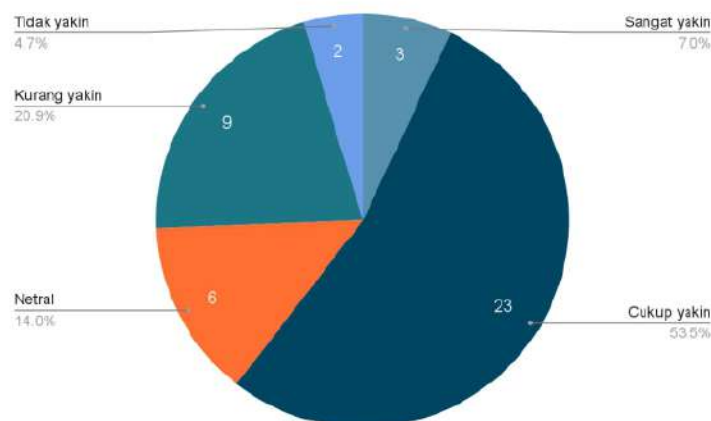
Grafik 3. Pengaruh informasi antikorupsi di X pada sikap atau tindakan terhadap korupsi sehari-hari



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 3 menyatakan sebagian besar responden mengalami perubahan sikap atau tindakan pada kehidupan sehari-hari terhadap tindakan korupsi setelah menerima informasi antikorupsi di X, yaitu sebanyak 26 dari 43 responden (60,5%).

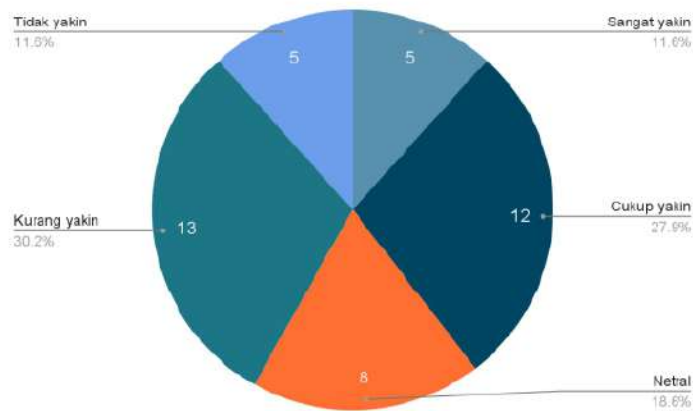
Tabel 4. Tingkat keyakinan terhadap pentingnya peran media sosial khususnya X dalam edukasi memberantas korupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden cukup yakin bahwa edukasi melalui media sosial, khususnya X, dapat berperan penting dalam memberantas korupsi, yaitu sebanyak 23 dari 43 responden (53,5%).

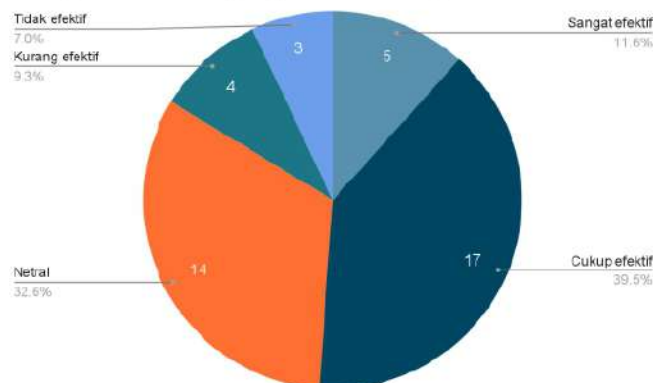
Grafik 5. Tingkat keyakinan terhadap peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X dalam mengurangi tingkat kemiskinan



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 5 membuktikan bahwa sebagian besar responden menilai kurang yakin bahwa peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X, dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat, yaitu sebanyak 13 dari 43 responden (30,2%).

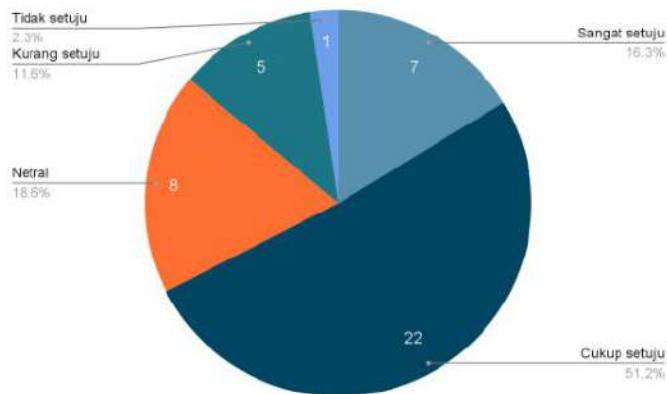
Grafik 6. Tingkat efektivitas penggunaan X, sebagai sarana edukasi antikorupsi



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 6 membuktikan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat efektivitas implementasi penggunaan X sebagai sarana edukasi antikorupsi cukup efektif, yaitu sebanyak 17 dari 43 responden (39,5%).

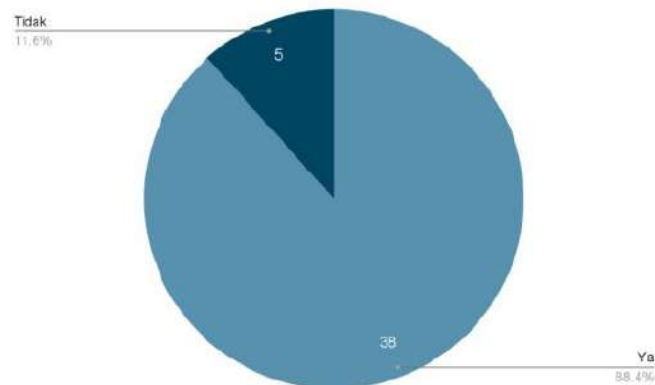
Grafik 7. Tingkat persetujuan platform media sosial seperti X, sebagai metode untuk meningkatkan pengetahuan tentang anti korupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan di masa depan



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 7 menunjukkan lebih dari setengah responden cukup setuju bahwa platform media sosial seperti X, dapat menjadi metode untuk meningkatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan di masa depan sebanyak 22 dari 43 responden (51,2%).

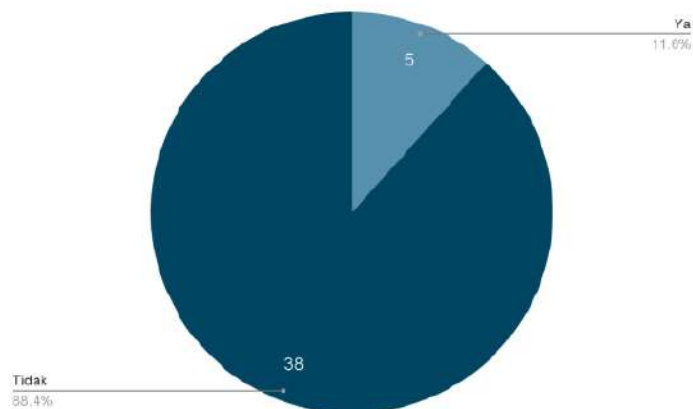
Grafik 8. Pengaruh penyebaran informasi pada X, pada hubungan antar masyarakat dalam interaksi sosial



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 8 menunjukkan mayoritas responden menyatakan bahwa penggunaan (X), dalam penyebaran informasi dapat memengaruhi hubungan antarmasyarakat dalam interaksi sosial, yaitu sebanyak 38 dari 43 responden (88,4%).

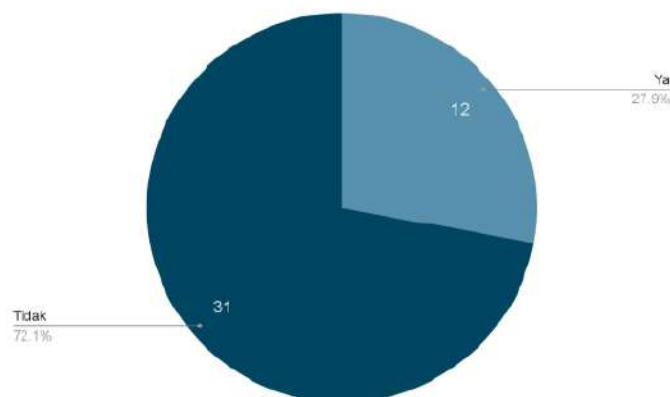
Grafik 9. Keterlibatan dalam kegiatan luring yang dipengaruhi oleh informasi atau kampanye antikorupsi di X



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 9 menunjukkan sebagian besar responden tidak pernah mengikuti atau terlibat dalam kegiatan antikorupsi yang diselenggarakan secara luring dari informasi yang didapatkan melalui X, yaitu sebanyak 38 dari 43 responden (88,4%).

Grafik 10. Keaktifan dalam menyebarkan informasi antikorupsi di X



Sumber : Hasil Responden sebagai Data Primer, 2023

Grafik 10 menunjukkan mayoritas responden tidak aktif dalam menyebarkan informasi antikorupsi di media sosial, terutama X, yaitu sebanyak 31 dari 43 responden (72,1%).

2. Analisis

Penjabaran hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan cara pembagian kuesioner membuahkan analisis dengan tujuan untuk membandingkan dan membuktikan hasil yang penulis dapatkan dengan teori-teori pendukung yang tertera pada bagian Pendahuluan. Analisis hasil penelitian beserta dengan penjabaran penjelasannya dengan pengelompokannya adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Informasi Korupsi dan Kemiskinan di X

Informasi korupsi dan kemiskinan di X dapat memiliki pengaruh terhadap pengguna aplikasi tersebut. Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan mayoritas responden sebanyak 34 dari 43 responden (79,1%) mendapatkan pengaruh berupa adanya penunjukkan sikap kritis terhadap tindakan korupsi setelah mendapatkan informasi di X. Selain itu, sebanyak 26 dari 43 responden (60,5%) mendapatkan pengaruh berupa perubahan pada sikap terhadap tindakan korupsi di X. Adapun teori yang dikemukakan oleh Ahmad mendukung kedua hasil penelitian tersebut yang menyatakan tentang pola pikir, sikap, dan perilaku dapat dipengaruhi oleh penggunaan platform sosial media (Ahmad, 2020, hlm. 135-136). Akan tetapi meskipun informasi korupsi dan kemiskinan di X terbukti berpengaruh dalam perubahan pada sikap terhadap korupsi di X, hal ini cenderung tidak dapat mengajak pengguna X untuk melakukan tindakan antikorupsi. Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden sebanyak 31 dari 43 responden (72,1%) yang menyatakan responden tidak aktif dalam menyebarkan atau menerima informasi antikorupsi di X. Jawaban ini membukakan dukungan yang kontradiksi terhadap teori yang dikemukakan sebelumnya oleh Forgie bahwa sebenarnya pengaruh X dapat membuat penggunaannya meningkatkan sikap partisipatif, bukan apatis terhadap bahaya korupsi (Forgie, 2012, hlm. 12).

2. Tingkat Efektivitas Kampanye Antikorupsi di X

Kampanye-kampanye di X dinilai berguna sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide baru yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Sebanyak 41,9% responden menyatakan bahwa kampanye antikorupsi di X cukup efektif, 9,3% responden menyatakan sangat efektif, dan hanya 2,3% responden menyatakan tidak efektif. Hasil penelitian tersebut didukung dengan pernyataan dalam teori Baharuddin yang mengungkapkan bahwa media sosial berpotensi untuk ide-ide baru dalam memaksimalkan setiap gerakan dan kampanye yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia (Baharuddin, 2021, hlm. 71).

3. Keyakinan terhadap Peran X dalam Edukasi

X dapat digunakan sebagai edukasi atau pembelajaran yang lebih terpersonalisasi dalam suatu bidang pendidikan. Sebagian besar responden (53,5%) menyatakan bahwa mereka cukup yakin akan peran X dalam edukasi antikorupsi. 17 responden (39,5%) juga menyatakan bahwa X cukup efektif sebagai sarana edukasi antikorupsi. Selain itu, sebanyak 22 responden (51,2%) cukup setuju bahwa X dapat meningkatkan pengetahuan tentang antikorupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut didukung oleh suatu teori yang telah dikemukakan oleh Forgie yang mengutarakan tentang X dapat dijadikan wadah edukasi dalam bidang pendidikan (Forgie, 2012, hlm. 12).

4. Kesadaran akan Bahaya Korupsi melalui X

X dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi. Jumlah responden yang sangat yakin bahwa X dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi sama dengan jumlah responden yang tidak yakin, yaitu 5 dari 43 responden (11,6%). Selain itu, sebanyak 13 dari 43 responden (30,3%) menyatakan responden kurang yakin bahwa X dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Jumlah ini tidak beda jauh dari jumlah responden yang cukup yakin akan hal tersebut, yaitu sebesar 27,9% atau sebanyak 12 dari 43 responden. Oleh karena itu, hasil penelitian bagian ini mengambil kesimpulan dengan mengutamakan persentase responden yang lebih tinggi, yaitu 30,3% atau sebanyak 13 dari 43 responden yang menyatakan cukup yakin akan keyakinan terhadap peningkatan kesadaran mengenai bahaya korupsi melalui X dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa akumulasi jawaban responden didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ahmad dengan teorinya yang menyatakan bahwa X dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran bahaya korupsi (Ahmad, 2020, hlm. 135-136).

5. Keterlibatan dalam Kegiatan Luring Melalui Informasi di X

Penyebaran informasi di X tidak dapat mendorong penggunaannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan antikorupsi. Hampir seluruh responden (88,4%) menyatakan bahwa responden tersebut tidak pernah terlibat dalam aktivitas atau kegiatan luring yang dipengaruhi oleh informasi dari X. Fakta ini membuahakan dukungan yang kontradiksi terhadap pendapat Ahmad bahwa sarana penyaluran informasi di X dapat mendorong keterlibatan masyarakat pada kegiatan antikorupsi (Ahmad, 2020, hlm. 135-136).

Simpulan

Korupsi telah merugikan berbagai pihak karena sifatnya yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Akibatnya, salah satu cara atau upaya penanggulangan yang dapat dilaksanakan adalah dengan memanfaatkan teknologi terutama sosial media, khususnya X, dalam penyaluran informasi berupa pemberian edukasi sebagai kesimpulan singkat pada penelitian ini. Secara lengkap, simpulan pada penelitian ini adalah X memiliki potensi sebagai sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat terhadap tindakan korupsi dan meningkatkan upaya kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi meskipun penyaluran pendidikan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang dalam penggunaan platform sosial media tersebut. Konteks tersebut dapat berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi yang berdampak kemiskinan. Terlebih lagi, upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dan kampanye yang aktif di X. Meskipun X mampu secara efektif menyampaikan informasi dan menjadi wadah beredukasi dalam bidang pendidikan, masyarakat masih kurang aktif dan belum meningkatkan sifat partisipatif dalam menyebarkan informasi tersebut sehingga platform ini belum dapat menggerakkan masyarakat secara optimal untuk terlibat dalam kegiatan antikorupsi yang diadakan secara luring. Dengan kata lain, penelitian ini menyimpulkan bahwa X, selain berfungsi sebagai platform media sosial, juga merupakan kanal distribusi informasi yang dapat memberikan dampak positif berupa tempat beredukasi. Penggunaan X tersebut mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara tidak langsung terhadap bahaya korupsi dengan upayanya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi yang berdampak pada masalah kemiskinan meskipun memiliki kesulitan dalam merangsang keterlibatan aktif masyarakat.

Kelompok1_UM142O_HANS PHILEMON LIMANZ

ORIGINALITY REPORT

1 %

SIMILARITY INDEX

1 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

0 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

2

kc.umn.ac.id

Internet Source

<1 %

3

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 7 words